



RENCANA KERJA

**KECAMATAN TORJUN
KABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2024**

**PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
TH 2024**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Hal ini tertuang dalam Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sebagai Perangkat Daerah, Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang menyusun Renja Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang Tahun 2024 yang mempunyai arti strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

- a. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari tujuan, sasaran dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan sebelumnya dalam Renstra Perangkat Daerah;
- b. Renja Perangkat Daerah disusun sebagai dokumen penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun berkenaan;
- c. Renja merupakan acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berkenaan;
- d. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah sendiri terdiri dari beberapa tahapan utama yaitu:

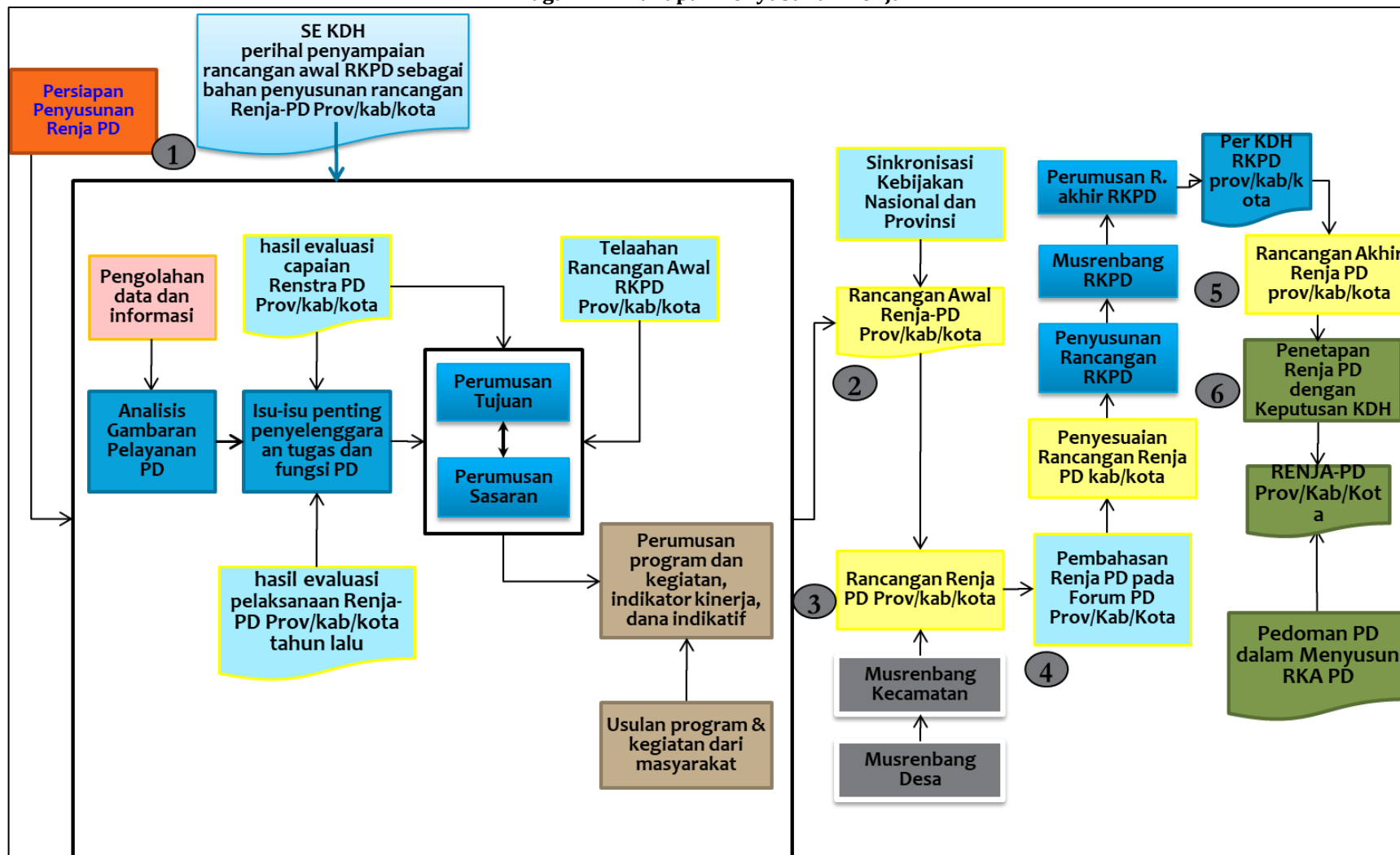
- a. Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah
- b. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah
- c. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah
- d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah yang difasilitasi oleh Kecamatan Torjun
- e. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah
- f. Penetapan Renja Perangkat Daerah

Setelah melalui beberapa tahapan dalam penyusunannya, Rancangan Renja perangkat daerah disempurnakan dan menjadi Renja Perangkat Daerah yang definitif dengan kriteria sebagai berikut:

1. Merupakan dokumen penjabaran Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024;
2. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2024;
3. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2024;
4. Program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang;
5. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (*outcome*), indikator kinerja keluaran (*output*) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju Tahun 2025.

Adapun bagan alir tahapan penyusunan dan kedudukan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 1.1
Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja



Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017

Renja Perangkat Daerah Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang disusun Sejalan dengan Tema RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2020 yaitu **“Peningkatan kontribusi sektor unggulan yang didukung oleh ketersediaan infrastruktur ekonomi yang memadai menuju Sampang Hebat Bermartabat”**, dan penjabaran dari tujuan Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang yang tertuang dalam Renstra yaitu

1. “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 104, Tambahan Negara Republik Indonesia No. 4421)
4. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua

- atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4614);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2015-2019;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2006 Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 7);
24. Peraturan Bupati Sampang Nomor 62 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Torjun Tahun 2023 adalah menyediakan acuan arah kebijakan pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan di Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang Tahun 2023.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Torjun Tahun 2023 secara umum adalah:

1. Tersedianya dokumen penjabaran Renstra Kecamatan Torjun Tahun 2019-2024 dan RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2023;
2. Tersedianya dokumen acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023;
3. Tersedianya dokumen yang digunakan sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2023, meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1).

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah yang meliputi Pendapatan, Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung beserta Program dan Kegiatannya.

BAB V PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2022 dimaksudkan untuk menilai sekaligus menganalisa pelaksanaan program maupun kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang. Evaluasi ini meliputi evaluasi kinerja Renja Tahun 2022 dan Renstra Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024. Dari evaluasi ini dapat diketahui secara langsung capaian kinerja program dan kegiatan sampai dengan tahun keempat pelaksanaan Renstra 2019-2024

Dengan demikian, dapat dilihat faktor-faktor pendorong keberhasilan dan faktor kendala yang terjadi selama melaksanakan program dan kegiatan yang telah tersusun dalam Renstra Kecamatan Torjun.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan dan Pencapaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun 2022

Pada tahun anggaran 2022 Anggaran Urusan Penunjang lainnya dilaksanakan oleh Kecamatan Torjun sebesar Rp. 3.247.636.481,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 261.730.399,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 630.332.491,00. Dengan total realisasi sebesar Rp. 3.031.504.622,00 (93,44%) terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.415.351.893,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 616.152.729,00. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 5 program dan 12 kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1
Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Tahun 2022 Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang

PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TA 2022				
KECAMATAN TORJUN				
NO	URAIAN	Alokasi Biaya		
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
	BELANJA TIDAK LANGSUNG			
	BELANJA LANGSUNG	3,247,636,481.00	3,031,504,622.00	
	URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR KEWILAYAHAN			

1	Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota	3,080,095,712.00	2,864,055,222	93%
	Perencanaan ,penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat daerah	14,025,047.00	13,507,625.00	96%
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat Daerah	908,421.00	904,500.00	100%
	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA -SKPD	958,233.00	954,800.00	100%
	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	777,993.00	775,300.00	100%
	Koordinasi dan penyusunan Dokumen DPA -SKPD	961,112.00	957,325.00	100%
	Koordinasi dan penyusunan Dokumen perubahan DPA -SKPD	1,030,297.00	1,028,700.00	100%
	Evaluasi kinerja perangkat Daerah	9,388,991.00	8,887,000.00	95%
	Administrasi keuangan perangkat Daerah	2,620,339,808.00	2,418,381,643.00	92,3%
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	2,617,303,990.00	2,415,351,893.00	92,3%
	Pelaksanaan penata usahaan dan pengujian verifikasi keuangan SKPD	1,249,425.00	1,247,350.00	100%
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan ahir tahun SKPD	840,014.00	839,800.00	100%
	Koordinasi dan penyusunan laporan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	946,379.00	942,600.00	100%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3,802,000.00	2,670,000.00	70,2%
	Bimbingan Tehnis Implementasi peraturan per undang undangan	3,802,000.00	2,670,000.00	70%
	Administrasi umum Perangkat Daerah	114,634,782.00	114,492,815.00	100%
	Penyediaan Komponen Instalasi listrik penerangan bangunan kantor	6,374,315.00	6,370,000.00	100%
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	15,838,793.00	15,837,050.00	100%
	Penyediaan bahan logistik kantor	5,719,104.00	5,706,625.00	100%
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5,766,250.00	5,765,950.00	100%
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	3,600,000.00	3,600,000.00	100%
	Fasilitasi kunjungan tamu	4,800,000.00	4,800,000.00	100%
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	72,536,320.00	72,413,190.00	100%
	Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusab Pemerintah	129,553,700.00	120,408,000.00	93%

	Pengadaan kendaran dinas operasional /lapangan	66,000,000.00	61,200,000.00	92,7%%
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	63,553,700.00	59,208,000.00	93%
	Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	97,247,129.00	97,212,439.00	100%
	Penyediaan jasa surat menyurat	17,099,129.00	17,092,825.00	100%
	Penyediaan jasa komunikasi Sumber daya air dan listrik	47,148,000.00	47,119,614.00	100%
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	33,000,000.00	33,000,000.00	100%
	Pemeliharaan barang milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	92,000,800.00	88,906,200.00	96,63%
	Penyediaan jasa pemeliharaan ,Biaya pemeliharaan,,pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	5,600,000.00	5,600,000.00	100%
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	9,400,000.00	9,398,700.00	100%
	Pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	77,000,800.00	73,907,500.00	96%
	Penataan Organisasi	8,492,446.00	8,476,500.00	100%
	Fasilitasi pelayanan Publik dan tata laksana	8,492,446.00	8,476,500.00	100%
2	Program penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	14,866,373.00	14,835,750.00	100%
	Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	14,866,373.00	14,835,750.00	100%
	Peningkatan Efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	14,866,373.00	14,835,750.00	100%
3	Program Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	74,959,903.00	74,912,550.00	100%
	Koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa			
	Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	34,373,450.00	34,333,900.00	100%
	Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	40,586,453.00	40,578,650.00	100%
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	57,825,000.00	57,825,000.00	100%

	Koordinasi upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum	57,825,000.00	57,825,000.00	100%
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tewntara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	54,000,000.00	54,000,000.00	100%
	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	3,825,000.00	3,825,000.00	100%
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	19,889,493.00	19,876,100.00	100%
	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemeintahan Desa	19,889,493.00	19,876,100.00	100%
	Fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa	7,325,895.00	7,313,500.00	100%
	Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa atau pendayagunaan aaet Desa	12,563,598.00	12,562,600.00	100%
	Jumlah	3,247,636,481.00	3,031,504,622.00	93%

Rata-rata realisasi kinerja program/kegiatan adalah 100% atau dapat dikategorikan sangat baik.

2.2.1 Evaluasi Pelaksanaan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi Renstra Kecamatan Torjun sampai dengan Tahun 2022 dilaksanakan dalam rangka mendukung capaian sasaran RPJMD 2019-2024 yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui sejauhmana perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut terealisasi sampai dengan tahun anggaran berjalan. Dalam Renstra Kecamatan Torjun Tahun 2019-2024 memuat 5 program dan 12 kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun.

Adapun rekapitulasi pelaksanaan Renstra Kecamatan Torjun tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Torjun dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d.Tahun2022

Kode Rekening	Tujuan /Sasaran Renstra 2022-2024	Urusan /Program /Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target Kinerja Capaian Prog./Keg. Renstra 2019-2024	Realisasi Kinerja s/d. Tahun 2022	Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022			Target Kinerja Tahun 2022	Prakiraan Realisasi Capaian Kinerja Renstra Tahun 2019-2024 s/d. Tahun 2022	
								Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasisa s/d. Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Resntra
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=7+10+11	(13)=12/6*100
	Tujuan:												
	Meningkatnya tata kelola Pemerintahan di Kecamatan		1	Nilai saki	-	81,05		BB	B	60,91	70		
	Sasaran:												
	1.Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan		1	IKM (indeks kepuasan masyarakat)	-	82,55	82,08	82	82 ,08	100%	82,,05	82	99%
	2.Meningkatnya tata kelola administrasi pemerintahan desa /kelurahan		2.	Persentase desa /kelurahan dengan tata kelola administrasi desa/kelurahan		100%	100%		100%	100%	100%		
4.05.													
4.05.4.05.14.37		Program PenYELENGARAAN Pemerintahan dan Pelaayanan Publik	1	Persentase rekomendasi administrasi pelayanan umum yang ditindaklanjuti tepat waktu	%	100,00	100 %	100%	100%	100%	100	100	100
		Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat Daeerah yang ada di Kecamatan		Persentase Rekomendasi administrasi pelayanan umum yang ditindak lanjuti teapat waktu		100,00	100%	100%	100%	100%	100%		

Kode Rekening	Tujuan / Sasasaran Renstra 2022-2024	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target Kinerja Capaian Prog./Keg. Renstra 2019-2024	Realisasi Kinerja s/d. Tahun 2022	Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022			Target Kinerja Tahun 2022	Prakiraan Realisasi Capaian Kinerja Renstra Tahun 2019-2024 s/d. Tahun 2022	
								Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasisa s/d. Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Resntra
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=7+10+11	(13)=12/6*100
		Koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	3	Persentase fasilitas pelayanan umum yang ditindak lanjuti	%	100.00	100%	100%	100%	100%	100	100	100
		Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat		Persentase pelayanan administrasi masyarakat yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300 %	100%
	Meningkatnya kemandirian Desa			Persentase Desa maju	%								
	Meningkatnya kemajuan dan kemandirian Desa			Persentase Desa maju				0,64			0,66		
		Program pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan		Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan				100%			100%		
		Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa		Persentase usulan program kegiatan pembangunan desa secara prioritas	100%			12 desa	12 desa		12 desa		
	Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Desa			Persentase Desa dengan tata kelola Pemerintahan Desa yang baik	100%			12 desa	4 desa		12 desa		

Kode Rekening	Tujuan / Sasasaran Renstra 2022-2024	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Capaian Prog./Keg. Renstra 2019-2024	Realisasi Kinerja s/d. Tahun 2022	Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022			Target Kinerja Tahun 2022	Prakiraan Realisasi Capaian Kinerja Renstra Tahun 2019-2024 s/d. Tahun 2022	
							Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasisa s/d. Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Resntra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=7+10+11	(13)=12/6*100
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan Desa		Persentase Desa dengan tata kelola pemerintahan Desa yang baik									
		Program pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa										
		Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pembinaan dan pengawasan desa yang difasilitasi	%		70%	100%			80%		
	Penurunan gangguan ketentrangan masyarakat dan ketertiban umum		Persentase penurunan gangguan kabtibmas									
	Penurunan gangguan ketentrangan masyarakat dan ketertiban umum		Persentase penurunan gangguan kamtibmas									
		Program koordinasi ketentrangan dan ketertiban umum	Persentase penurunan gangguan kamtibmas									
		Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentrangan dan ketertiban umum	Persentase Desa dengan satuan perlindungan masyarakat yang aktif			26			34			

Kode Rekening	Tujuan / Sasasaran Renstra 2022-2024	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Capaian Prog./Keg. Renstra 2019-2024	Realisasi Kinerja s/d. Tahun 2022	Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022			Target Kinerja Tahun 2022	Prakiraan Realisasi Capaian Kinerja Renstra Tahun 2019-2024 s/d. Tahun 2022	
							Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasisa s/d. Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Resntra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=7+10+11	(13)=12/6*100

Evaluasi terhadap rekapitulasi pelaksanaan Renstra Kecamatan Torjun sampai dengan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Realisasi kinerja Tahun 2022 93,34%, pada Periode Renstra Kecamatan Torjun tahun keempat adalah Th2022 Renstra Tahun 2019-2024, sehingga
2. Semua program dan kegiatan di Renstra pada Tahun 2019-2024 telah dijabarkan sepenuhnya dalam Renja Perangkat Daerah tahun tersebut.
3. Terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan pergeseran karena direncanakan perubahan pada SOTK Kecamatan Torjun yang baru.

2.3 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang

Analisis terhadap indikator kinerja pelayanan harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan. Berdasarkan Renstra Perubahan 2019-2024 target dan realisasi indikator sasaran yang mencerminkan indikator kinerja pelayanan Kecamatan Torjun dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang

No.	Indikator Kinerja Pelayanan Kecamatan Torjun	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase Penyelesaian Dokumen Kependudukan Tepat waktu				100	100	100		95	100	100	
2	Persentase Penyelesaian Dokumen Perijinan Tepat waktu				100	100	100		100	100	100	
3	Jumlah Prioritas Perencanaan Pembangunan Desa Yang Bersifat Partisipatif				20	20	20		20	50	50	
4	Persentase Desa Yang Tertib Administrasi				100	100	100		100	100	100	

2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Sampang

Kecamatan Torjun sebagai pelaksana pelayanan masyarakat di tingkat kecamatan mengacu pada tugas pokok dan fungsi lembaga sebagaimana diatur **Peraturan Bupati No. 56 Tahun 2016** tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Sampang. Pelayanan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan public di tingkat kecamatan.

Sebagaimana termuat dalam Renstra Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024, isu – isu strategis yang dihadapi Kecamatan Torjun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya selama kurun waktu tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang kurang memadai
2. SDM pada Kecamatan Torjun dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masih belum optimal
3. Penggunaan teknologi informasi terhadap proses pelayanan yang masih belum maksimal.

2.5 Faktor – faktor Kunci Keberhasilan

Faktor – faktor kunci pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Torjun berhasil mencapai hasil-hasil yang direncanakan sebagai berikut :

- 1 Kebijakan pemerintah baik berupa Undang-undang, Peraturan menteri dan peraturan pendukung lainnya untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Torjun secara ideal;
- 2 Komitmen pemerintah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien;
- 3 Perkembangan teknologi dan informasi.

2.6 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Sampang tahun 2020 dilakukan melalui proses membandingkan antara usulan program dan kegiatan yang dijabarkan dalam rancangan awal RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2020 dengan kebutuhan riil Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang pada tahun tersebut.

Hal ini dilakukan dalam rangka mengakomodir usulan-usulan pelaksanaan pelayanan yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daeah yang dikompilasikan dengan kebutuhan riil dengan tujuan menetapkan program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2020 yang merupakan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan tupoksi Kecamatan di Kabupaten Sampang. Review tersebut di gambarkan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 Kabupaten Sampang

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2020					HASIL ANALISA KEBUTUHAN KECAMATAN TORJUN TAHUN 2020				
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6
4.05.4.05.14.01.	Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran		Persentase pemenuhan layanan administrasi dan jasa perkantoran	100%	121.050.000	Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran		Persentase pemenuhan layanan administrasi dan jasa perkantoran	100%	249.990.000
4.05.4.05.14.01.01.	Pelayanan administrasi dan jasa perkantoran		a. Jumlah Surat Terkirim	400 Surat	65.559,300	Pelayanan administrasi dan jasa perkantoran	Kec. Torjun	a. Jumlah Surat Terkirim	400 Surat	164..550.00
			b. Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Listrik, Air dan Komunikasi	12 Bulan	-			b. Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Listrik, Air dan Komunikasi	12 Bulan	-
			c. Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang Memperoleh Jasa Perizinan	13 Unit	-			c. Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang Memperoleh Jasa Perizinan	25 Unit	-
			d. Cakupan pemenuhan jasa kebersihan	3 Ob	-			d. Cakupan pemenuhan jasa kebersihan	4 Ob	-
			e. Jumlah bahan bacaan yang disediakan	365 exp	-			f. Jumlah bahan bacaan yang disediakan	12 bln	-
			f. Jumlah pemenuhan Kebutuhan makanan dan minuman	480 ok	-			g. Jumlah pemenuhan Kebutuhan makanan dan minuman	960 ob	-
4.05.4.05.14.01.02.	Penyediaan sarana administrasi perkantoran		a. Jumlah ATK	26 Jenis	34.340.700	Penyediaan sarana administrasi perkantoran	Kec. Torjun	a. Jumlah ATK	26 Jenis	50.790.000
			b. Jumlah Barang Cetak	10 Jenis	-			b. Jumlah Barang Cetak	11 Jenis	-
			c. Jumlah Barang Penggandaan	8000 Lembar	-			c. Jumlah Barang Penggandaan	10.000 Lembar	-
			d. Jumlah Komponen Instalasi Listrik	10 Jenis	-			d. Jumlah Komponen Instalasi Listrik	11 Jenis	-
			e. Jumlah alat kebersihan yang disediakan	20 jenis	-			e. Jumlah alat kebersihan yang disediakan	30 jenis	-
4.05.4.05.14.01.03.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Dalam Daerah dan Luar Daerah	a. Jumlah Koordinasi dalam Daerah	72 Ok	21.150.000	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Dalam Daerah dan Luar Daerah	a. Jumlah Koordinasi dalam Daerah	60 kl	34.650.000
			b. Jumlah Koordinasi Luar daerah	4 Ok	-			b. Jumlah Koordinasi Luar Daerah	8 kl	-

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2020					HASIL ANALISA KEBUTUHAN KECAMATAN TORJUN TAHUN 2020				
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6
4.05.4.05.14.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	321.277.750	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	211.155.000
4.05.4.05.14.02.01.	Pembangunan/rehab/pemeliharaan gedung kantor		a. Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	1 Unit	55.700.000	Pembangunan/rehab/pemeliharaan gedung kantor	Kec. Torjun	a. Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	1 Unit	24.690.000
4.05.4.05.14.02.02.	Pembangunan/rehab/pemeliharaan rumah jabatan		b. Jumlah rumah jabatan yang Dipelihara	1 Unit	31.210.000			b. Jumlah rumah jabatan yang Dipelihara	1 Unit	8.385.000
4.05.4.05.14.02.03.	Pengadaan/pemeliharaan kendaraan dinas operasional		a. Jumlah kendaraan dinas R4 yang disediakan	1 Unit	90.000.000	Pengadaan/pemeliharaan kendaraan dinas operasional	Kec. Torjun	a. Jumlah kendaraan dinas R4 yang diadakan	1 Unit	90.000.000
4.05.4.05.14.02.04.	Pengadaan/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor		a. Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	0 unit	144.367.750	Pengadaan/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kec. Torjun	a. Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	0 unit	88.080.000
			b. Jumlah Peralatan & Perlengkapan Kantor yang dipelihara	10 Jenis	-			b. Jumlah Peralatan & Perlengkapan Kantor yang dipelihara	10 Jenis	-
			c. Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor	0 Unit	-			c. Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor	0 Unit	-
			d. Jumlah Spanduk / Umbul-Umbul / Bendera yang disediakan	3 Jenis	-			d. Jumlah Spanduk / Umbul-Umbul / Bendera yang disediakan	3 Jenis	-
			e. Jumlah Komputer yang disediakan	1 Unit	-			e. Jumlah Komputer yang disediakan	4 Unit	-
			f. Jumlah Printer yang disediakan	2 Unit	-			f. Jumlah Printer yang disediakan	5 Unit	-
			g. Jumlah meubeliarr yg disediakan	8 Unit	-			g. Jumlah meubeliarr yg disediakan	8 Unit	-
			h. Jumlah meubelair yg dipelihara	8 Unit	-			h. Jumlah meubelair yg dipelihara	20 Unit	-
			Jumlah perangkat pengarsipan dokumen	1 paket	-			Jumlah perangkat pengarsipan dokumen	1 paket	-
4.05.4.05.14.03.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur	100%	5.000.000	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur	100%	5.000.000
4.05.4.05.14.03.01.	Pelaksanaan bimtek/sosialisasi/seminar	Luar Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek/sosialisasi/seminar	1 ASN	5.000.000	Pelaksanaan bimtek/sosialisasi/seminar	Luar Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek/sosialisasi/seminar	1 ASN	5.000.000

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2020					HASIL ANALISA KEBUTUHAN KECAMATAN TORJUN TAHUN 2020				
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6
4.01.4.01.01.0 4.	Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Informasi Publik		Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja, dan pelayanan publik yang baik dan tepat waktu	100%	52.000.000	Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Informasi Publik		Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja, dan pelayanan publik yang baik dan tepat waktu	100%	59.223.750
4.01.4.01.01.0 4.01.	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	Kec. Torjun	Jumlah Laporan Kemajuan Fisik/Non Fisik, Laporan Triwulanan, Laporan Semesteran, Laporan Akhir Tahun, CALK, LKJIP	6 Dok	11.800.000	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	Kec. Torjun	Jumlah Laporan Kemajuan Fisik/Non Fisik, Laporan Triwulanan, Laporan Semesteran, Laporan Akhir Tahun, CALK, LKJIP	6 Dok	10.092.500
4.01.4.01.01.0 4.02.	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Kec. Torjun	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA dan DPA	3 Dok	15.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Kec. Torjun	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA dan DPA	3 Dok	15.110.000
4.01.4.01.01.0 4.03.	Peningkatan Pelayanan Informasi Publik	Kec. Torjun	Jumlah Dokumen SKM	1 Dok	25.200.000	Peningkatan Pelayanan Informasi Publik	Kec. Torjun	Jumlah Dokumen SKM	1 Dok	34.021.250
4.05.4.05.14.37.	Program Peningkatan Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	Kec. Torjun	Persentase rekomendasi administrasi pelayanan umum yang ditindak lanjuti tepat waktu	100%	141.194.000	Program Peningkatan Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	Kec. Torjun	Persentase rekomendasi administrasi pelayanan umum yang ditindak lanjuti tepat waktu	100%	151.464.950
			Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti	100%	-			Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti	100%	-
			Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan	100%	-	Program Peningkatan Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	Kec. Torjun	Persentase rekomendasi administrasi pelayanan umum yang ditindak lanjuti tepat waktu	100%	-
4.05.4.05.10.37.01.	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung lingkungan sehat perumahan	Kec. Torjun	Pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung lingkungan sehat di ibukota kecamatan	1 pkt	72.800.000	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung lingkungan sehat perumahan	Kec. Torjun	Pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung lingkungan sehat di ibukota kecamatan	1 pkt	88.850.000
4.05.4.05.14.37.02.	Peningkatan peran serta masyarakat terhadap keamanan lingkungan	Kec. Torjun	Jumlah monitoring keamanan lingkungan desa yang dilaksanakan	12 kali	6.120.000	Peningkatan peran serta masyarakat terhadap keamanan lingkungan	Kec. Torjun	Jumlah monitoring keamanan lingkungan desa yang dilaksanakan	12 kali	10.500.000
4.05.4.05.14.37.03.	Pembinaan dan monitoring pelayanan administrasi desa	Kec. Torjun	Jumlah desa dengan administrasi yang baik	12 desa	27.104.000	Pembinaan dan monitoring pelayanan administrasi desa	Kec. Torjun	Jumlah desa dengan administrasi yang baik	14 desa	16.712.500

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2020					HASIL ANALISA KEBUTUHAN KECAMATAN TORJUN TAHUN 2020				
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6
			Jumlah desa yang di evaluasi APBDes nya	14 desa				Jumlah desa yang di evaluasi APBDes nya	14 desa	
4.05.4.05.14.37.05.	Fasilitasi pelaksanaan Musrenbang RKPD di kecamatan	Kec. Torjun	Jumlah pra musrenbangcam	1 kali	24.000.000	Fasilitasi pelaksanaan Musrenbang RKPD di kecamatan	Kec. Torjun	Jumlah pra musrenbangcam	1 kali	26.994.250
			Jumlah musrenbangcam	1 kali				Jumlah musrenbangcam	1 kali	
			Laporan hasil musrenbang	1 kali				Laporan hasil musrenbang	1 kali	
4.05.4.05.14.37.04.	Fasilitasi pelayanan perijinan tingkat kecamatan	Kec. Torjun	Persentase permohonan administrasi layanan umum yang di proses	100%	11.170.000	Fasilitasi administrasi pelayanan Umum	Kec. Torjun	Persentase permohonan administrasi layanan umum yang di proses	100%	8.408.200

Hasil analisa menunjukkan bahwa semua program dan kegiatan yang dijabarkan di Rancangan Awal RKPD 2020 sudah sesuai kebutuhan Program dan Kegiatan Kecamatan Torjun Tahun 2024.

2.7 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi maupun perguruan tinggi. Berdasarkan hasil telaahan data dan informasi informasi dari penelitian lapangan serta pengamatan pelaksanaan musrenbang Kecamatan. Uraian dari kajian tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Kecamatan Torjun Tahun 2023

Perangkat Daerah: Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah kabupaten /kota	Kec. Torjun	Persentase penunjang urusan pemerintahan Daerah yang difasilitasi		
2	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Kec. Torjun	Rekomendasi administrasi pelayanan umum yang ditindak lanjuti tepat waktu		
3	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Kec. Torjun	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan		
4	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Kec. Torjun	12 Desa		
5	Program pembinaan dan pengawasa pemerintahan desa	Kec. Torjun	1. Persentase kualitas tata kelola penataan Desa		

Usulan Program dan Kegiatan yang diusulkan Kecamatan Torjun pada dasarnya adalah sebagai implementasi dan menunjang pada pelaksanaan pelayanan publik secara umum.

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD

Kabupaten Sampang

TAHUN 2022

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Pemerintah Daerah dan Program/Kegi atan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/Progra m/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu 2021	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan 2022 yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2022)	Realisasi Anggaran Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan)	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d tahun 2024 (%)	Perangk at Daerah Pengang gungjaw ab							
								I		II		III		IV												
								9	10	11	12	13 =9+10+11+12	14 = 7 + 13	15=14/6 x100%	16											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 =9+10+11+12		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
																										Kec.
	Meningkatny a kualitas pelayanan publik tingkat kecamatan	.7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH KABUPATEN/K OTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang di fasilitasi																						Kec. Torjun
		.7.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang di fasilitas		40.000.000	5dok	15.117.825		35.215.047	2 dok	5.657.325	1 dok	1.056.000					3 dok	6.713.325	8 dok	21.831.150		54,57%		

		.7.01.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan SKPD	2 dok	5.000.000	2 dok	2.977.000	2 dok	5.068.421								2 dok	2.977.000		59,54%	
		.7.01.01.2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD Tahun 2022 yang disusun	1 dok	5.000.000	1 dok	2.978.900	1 dok	5.208.233								1 dok	2.978.900		59,54%	
		.7.01.01.2.01.03.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA Tahun 2022 yang disusun	1 dok	5.000.000		-	1 dok	2.977.993												
		.7.01.01.2.01.04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Tahun 2022 yang disusun	1 dok	5.000.000	1 dok	2.978.925	1 dok	3.161.112	0	957.325				0	957.325	1 dok	3.936.250		78,72%	
		.7.01.01.2.01.05.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD Tahun 2022 yang disusun	1 dok	5.000.000		-	1 dok	1.910.297												
		.7.01.01.2.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun	1 dok	15.000.000	1 dok	6.183.000	5 dok	16.888.991	2 dok	4.700.000	1Dok	1.056.000		3 dok	5.756.000	4 dok	11.939.000		79,72%	
		.7.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang di fasilitas		3.269.450.000		2.438.725.066	100%	2.532.869.205		359.101.188		796.929.512			1.156.030.700		3594755766		109,94%	
		.7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai ASN	kl	3.236.950.000	14 kl	2.420.876.016	14 kl	2.524.043.387	3 kl	358.411.238	4kl	796.929.512		7 kl	1.155.340.750	21 kl	3.576.216.766		109,94%	
		.7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ATK yang disediakan	mcm	15.000.000	2 mcm	10.945.850										2 mcm	10.945.850			
		.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah dokumen verifikasi keuangan	keg	7.500.000	12 keg	1.923.900	5 keg	1.249.425	2 keg	689.95				2keg	689.95	14 keg	2.613.850		34,85%	

		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen instalasi Listrik yang disediakan	jenis	14.000.000	12 jenis	9.548.900	9 jenis	5.249.315	4 jenis	2.270.000					4 jenis	2.270.000	16 jenis	11.818.900		93,24%	
		7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	jenis	25.000.000	20 jenis	21.217.000	18 jenis	15.838.793	8 jenis	7.835.650					8 jenis	7.835.650	28 jenis	29.052.650		116,21%	
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah alat tulis kantor	jenis	10.000.000			16 jenis	5.719.104	5 jenis	1.396.150	5 jenis	1.423.200			10 jenis	2.819.350	10 jenis	2.819.350		28,19%	
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	jenis	8.500.000	6 jenis	7.266.450	7 jenis	3.500.000	3 jenis	2.750.000					3 jenis	2.750.000	9 jenis	10.016.450		117,84%	
		7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	eks	3.600.000	12 bln	1.800.000	12 bln	3.600.000	3 bln	900	3 bln	900			6bln	1.800.000	18 bln	3.600.000		100%	
		7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah pemenuhan mamin Kunjungan Tamu	ok	5.500.000	12 bln	4.800.000	120 ob	4.800.000	30 ob	1.200.000	20 ob	800			50 ob	2.000.000	50 ob	6.800.000		123,63%	
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-Jumlah BBM yg dibutuhkan,jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah,jumlah pemenuhan mamin rapat ,jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	ok,kl,k l,lt	60.000.000	12 bln	33.942.600	1200lt ,7ok,750,600k	57.536.320	300 lt,3ok	10.299.050	250lt, 1ok	9.705.000			550 lt,4ok	20.004.050	550lt, 4ok	53.946.650		89,91%	
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase urusan penunjang pemerintahan Daerah yang difasilitasi		259.500.000	24 unit	170.388.000	100%	129.553.700			1 unit	15.300.000			1 unit	15.300.000	1 unit	185.688.000		71,55%	

	7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas R4 yang disewa	unit	66.000.000	1 unit	62.400.000	1 unit	66.000.000			1 unit	15.300.000				1 unit	15.300.000	2 unit	77.700.000		117,72%
	7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel kantor yang disediakan	unit	25.000.000	12 unit	19.680.000												12 unit	19.680.000		
	7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan peralatan dan mesin	unit	168.500.000	11 unit	88.308.000	15 unit	63.553.700										11 unit	88.308.000		
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintahan Daerah yang difasilitasi		113.000.000		89.276.007	100%	93.847.129		20.389.375		20.671.050					41.060.425		130.336.432		115,34%
	7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim	srt	12.000.000	500srt	10.254.000	500 surat	13.699.129	60 srt	3.201.375	60 srt	3.765.050				120 srt	6.966.425	620 srt	17.220.425		143%
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pemenuhan kebutuhan Air dan listrik	bln	50.000.000	12 bln	46.022.007	12 bln	47.148.000	13 bl	11.688.000	3 bl	11.406.000				6 bl	23.094.000	18 bln	69.116.007		138,23%
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	cakupan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	bln	51.000.000	12 bl	33.000.000	12 bln	33.000.000	2 bln	5.500.000	2 bl	5.500.000				4 bln	11.000.000	14 bln	44.000.000		86,27%
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjangf urusan pemerintahan daerah yang di fasiltasi		104.500.000		73.400.000	100%	88.000.800		2.000.000	7 unit	3498700				13 unit	5.498.700		75.400.000		72,15%
	7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas / kendaraan Dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang memperoleh jasa perizinan	unit	7.000.000	18 unit	5.600.000	20 unit	5.600.000			5 unit	2.800.000				5 Unit	2.800.000	23 unit	8.400.000		120%
	7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mobiler	Jumlah Mobiler yang dipelihara		7.500.000	50 unit	4.000.000												18 unit	4.000.000		

		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yg dipelihara	unit	15.000.000	24 unit	11.000.000	15 unit	5.400.000	6 unit	2.000.000	2 unit	698.7					8 ubit	2.698.700	32 unit	13.698.700		91,32%
		7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	unit	75.000.000	7 unit	52.800.000	1 unit	77.000.800											7 unit	52.800.000		
		7.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di fasilitasi		40.000.000			100%	8.492.446														
		7.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Jumlah dokumen SKM 2 jumlah promosi pelayanan publik perangkat daerah	dok	40.000.000			-	1dok	8.492.446													
	Meningkatnya kualitas pelayanan tingkat kecamatan	7.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase rekomendasi administrasi pelayanan umum yang di tindak lanjuti tepat waktu				4.423.814	100%	14.866.373	1 dok	5.666.500							1 dok	5.666.500		10.090.314		
		7.01.02.2.04	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	persentase rekomendasi administrasi playanan umum yang ditindak lanjuti tepat waktu					100%	14.866.373	1 dok	5.666.500		7.148.300					1 dok	12.814.800	1dok	12.814.800		
		7.01.02.2.02.03	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	1 Jumlah inovasi pelayanan kepada masyarakat 2 jumlah kelompok masyarakat yang berdaya	buah	10.000.000		0	4buah, 3desa	14.866.373	1 dok	5.666.500	4 buah	7.148.300					4 bh,1dok	12.814.800	4bh,1 dok	12.814.800		128,14%

		7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayan non perizinan	persentase pelayanan administrasi umum yang diproes tepat waktu	1 th			3.130.414										1 th	3.130.414					
		7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	jumlah koordinasi dan fasilitasi kewenangan lain yang dilimpahkan	1 th			1.293.400										1 th	1.293.400					
	Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa	07.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan		101.000.000		69.268.150	100%	72.780.128			40.858.900		5.528.650				46.387.550	2 dok,12 desa	115.655.700		114,51%	
		7.01.03.2.01	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan		101.000.000		69.268.150	100%	72.780.128			40.858.900		5.528.650				46.387.550	2 dok,12 desa	115.655.700		114,51%	
		7.01.03.2.01.01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	1. jumlah dokumen laporan potensi desa 2. jumlah usulan program kegiatan pembangunan desa yang difasilitasi	desa	35.000.000	2 keg	28.298.000	2 dok,12 desa	34.373.450	2 dok,12 desa		34.333.900						34.333.900	2 dok,12 desa	12 desa	62.631.900	178,94%	
		7.01.03.2.01.03	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah usulan program kegiatan pembangunan desa yang difasilitasi	desa	66.000.000	3 desa	40.970.150	12 desa	38.406.678	3 desa		6.525.000	2 desa	5.528.650					5 desa	12.053.650	3 desa	53.023.800	80,33%

	Meningkatnya kenyamanan, ketertiban dan keamanan lingkungan	07.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	a. Persentase penanganan pelanggaran perda dan ketertiban umum b. persentase desa dengan satuan perlindungan masyarakat yg aktif, c. persentase penurunan peredaran rokok ilegal.. persentase penurunan gangguan kamtibmas		60.000.000		38.160.000	100%	56.650.000	0	1.275.000		9.900.000				0	11.175.000	49.335.000	82,22%		
		7.01.04.2.01	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	1.a.persentase penanganan pelanggaran perda dan ketertiban umum b.persentase desa dengan satuan perlindungan masyarakat yang aktif c. persentase penurunan peredaran rokok ilegal 2 persentase penurunan gangguan kamtibmas		60.000.000		38.160.000	100%	56.650.000		1.275.000		9.900.000				4 kl	11.175.000	49.335.000	82,22%		
		7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi fertikal di wilayah kecamatan	1.Jumlah moniv pengendalian penyebaran covid 19 .2. .jumlah siskamling desa aktif	desa	60.000.000	12 desa	38.160.000	12 desa	54.000.000			3 kl	9.900.000				3kl	9.900.000	15 desa	48.060.000	80,10%	

		7.01.04.2.01.02	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat					2 kl	2.550.000	1 kl	1.275.000					1 kl	1.275.000	1 kl	1.275.000				
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	7.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1.Persentase perangkat Daerah yang menyusun dokumen RKA/DPA tepat waktu 2 persentase penyerapan anggaran skpd sesuai dengan anggaran kas, 3. Persentase PD yang menyusun lap keuangan tepat waktu		10.000.000		5.782.076	100%	19.889.493		1.020.000	8 Desa	6.655.800			10 Desa	7.675.800	22 desa	13.457.876		134%	
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase PD yang menyusun dokumen RKA/DPA tepat waktu 2. Persentase penyerapan anggaran SKPD sesuai dengan anggarankas.3. Persentase PD yang menyusun lap keuangan tepat waktu		10.000.000	12 desa	5.782.076	100%	19.889.493	2 desa	1.020.000	8 desa	6.655.800			8 desa	7.675.800		13.457.876		134%	
		7.01.06.2.01.02	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang dilakukan pembinaan administrasinya	desa	10.000.000	12 desa	5.782.076	12 desa	7.325.895	2 desa	1.020.000	4 desa	2.032.800			6 desa	3.052.800	18 desa	8.834.876		88,34%	
		7.01.06.2.01.03	Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Evaluasi APBdesnya	desa				12 Desa	12.563.598			4 desa	4.623.000			4 desa	4.623.000	4 desa	4.623.000			

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah, tentunya harus memperhatikan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi. Hal ini ditujukan demi tercapainya sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

Penentuan prioritas dan sasaran pembangunan nasional Tahun 2023 tertuang dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah **(RKP) Tahun 2024** dengan Tema **“Peningkatan Produktifvitas untuk Transformasi Ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan”**.

Kecamatan Torjun sebagai unsur penunjang mempunyai tugas dan fungsi perencanaan pembangunan dituntut untuk dapat menterjemahkan dan mensinergikan prioritas pembangunan antara provinsi dan daerah. Adapun sinkronisasi prioritas pembangunan daerah, provinsi dan pusat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten Sampang Tahun 2024

NO.	Nasional TH 2020-2024	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG
1	7 Prioritas Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	7 Prioritas Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sector sekunder pariwisata	4 Prioritas Pemantapan pemulihanekonomi melalui penguatan sector unggulan dan infrastruktur yang berkelanjutan
2	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Penguatan konektifitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia melalui pengentasan kemiskinan, kualitas pendidikan, kesehatan serta sarana dan prasaranan dasar
3	Meningkatkan sumber daya manusia dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, Kesehatan, Produktifitas dan daya saing ketenaga kerjaan serta pengentasan kemiskinan	
4	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	Peningkatan kepedulian dan pelestarian nilai nilai budaya lokal	Peningkatan kualitas pelayanan public melalui percepatan reformasi borakrasi dan inovasi Daerah
5	Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomidasar	Peningkatan kemandirian pangan, dan pengelolaan sumber daya energi	Menjaga harmonisasi kehidupan sosial masyarakat

6	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup	
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankamdan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan public bagi masyarakat Jawa Timur	

Sumber : RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2020

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Torjun Tahun 2024 haruslah konsisten dan selaras dengan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Torjun yang telah dituangkan dalam Renstra Kecamatan Torjun Tahun 2019-2024. Adapun tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Kecamatan Torjun pada Tahun 2022 sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang Tahun 2023

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023
	Tujuan:		
2.	Meningkatnya tata kelola Pemerintahan di kecamatan	Nilai Sakip	BB
	Sasaran:		
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan	IKM (Indeks kepuasan Masyarakat)	82,55
2.	Meningkatnya tata kelola administrasi pemerintahan Desa /Kelurahan	Persentase Desa/Kelurahan dengan tata kelola administrasi Desa/Kelurahan yang baik	100%
.			

3.3 Program dan Kegiatan

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang Tahun 2024

Dalam merumuskan program kegiatan Kecamatan Torjun mempertimbangkan beberapa faktor penting. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan salah satunya yaitu pencapaian visi dan misi kepala daerah. Merujuk pada RPJMD Kabupaten Sampang, Kecamatan Torjun mendukung pada pencapaian **Misi 4**

.Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik Program aksi yang tertuang dalam RPJMD terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Torjun yaitu Optimalisasi transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan kinerja pemerintahan daerah. Program aksi tersebut kelak akan dijabarkan dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Sebagaimana telah tertuang dalam Renstra Kecamatan Torjun Tahun 2019-2024, Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang mendukung pada pencapaian misi 4 RPJMD Kabupaten Sampang serta mendukung pada pencapaian sasaran **“Meningkatnya kualitas pelayanan publik, “ dan “Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Desa”**

Adapun program-program yang mendukung pada sasaran tersebut, yaitu:

- Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
- Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
- Program Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan
- Program Pengembangan Data, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan dan Program Penelitian dan Pengembangan.
- Program Penelitian dan Pengembangan

Program-program diatas kemudian dikompilasikan dengan hasil analisa kebutuhan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya sehingga perumusan rencana program dan kegiatan Kecamatan Torjun Tahun 2024 sebagaimana terlampir sesuai dengan hasil entry rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Torjun Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 pada sistem aplikasi Sampangkab.**SIIPD.Kemendagri.go.id** .

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Kecamatan Torjun mengampu urusan Unsur Unsur Penunjang. Program-program Kecamatan Torjun pada Tahun 2024 mendukung prioritas pembangunan “**Prioritas 4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik melalui Percepatan Reformasi Birokrasi dan Inovasi Daerah**” sebagaimana tertuang pada RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2024. Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Torjun dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Pada Tahun 2024 Kecamatan Torjun akan melaksanakan Urusan Unsur Penunjang dengan total anggaran Rp 2,851.913,723,00 yang terdiri dari **Belanja Tidak Langsung** sebesar Rp 2.529.586.984,00-dan **Belanja Langsung** sebesar Rp322,326.739,00. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung dan melaksanakan 1 **urusan**, 5 **program dan 12 kegiatan**. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan yaitu di Kecamatan Torjun dan lingkup Kabupaten Sampang.

7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Kab. Sampang, Torjun, Semua Kelurahan		1 Orang		10,000,000	10,000,000	PENDAPATAr ASLI DAERAI (PAD)	J 1
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								140,600,000	101,500,000		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Kab. Sampang, Torjun, Semua Kelurahan		10 Paket		17,500,000	5,000,000	PENDAPATAr ASLI DAERAI (PAD)	J 1
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Kab. Sampang, Torjun, Semua Kelurahan		18 Paket		20,000,000	15,000,000	PENDAPATAr ASLI DAERAI (PAD)	J 1
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Kab. Sampang, Torjun, Semua Kelurahan		16 Paket		15,000,000	15,000,000	PENDAPATAr ASLI DAERAI (PAD)	J 1
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		Kab. Sampang, Torjun, Semua Kelurahan		7 Paket		8,500,000	8,500,000	PENDAPATAr ASLI DAERAI (PAD)	J 1
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		Kab. Sampang, Torjun, Semua Kelurahan		12 Dokumen		3,600,000	3,000,000	PENDAPATAr ASLI DAERAI (PAD)	J 1
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Kab. Sampang, Torjun, Semua Kelurahan		120 Laporan		6,000,000	5,000,000	PENDAPATAr ASLI DAERAI (PAD)	J 1
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Kab. Sampang, Torjun, Semua Kelurahan				70,000,000	50,000,000	PENDAPATAr ASLI DAERAI (PAD)	J 1
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								192,600,000	100,000,000		
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		Kab. Sampang, Torjun, Semua Kelurahan		1 Unit		72,600,000	70,000,000	PENDAPATAr ASLI DAERAI (PAD)	J 1
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		Kab. Sampang, Torjun, Semua Kelurahan		12 Unit		50,000,000	15,000,000	PENDAPATAr ASLI DAERAI (PAD)	J 1
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Kab. Sampang, Torjun, Semua Kelurahan		10 Unit		70,000,000	15,000,000	PENDAPATAr ASLI DAERAI (PAD)	J 1
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								106,876,000	83,500,000		
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Kab. Sampang, Torjun, Semua Kelurahan		300 Laporan		15,000,000	2,500,000	PENDAPATAr ASLI DAERAI (PAD)	J 1
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Kab. Sampang, Torjun, Semua Kelurahan		3 Laporan		51,876,000	48,000,000	PENDAPATAr ASLI DAERAI (PAD)	J 1
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Kab. Sampang, Torjun, Semua Kelurahan		5 Laporan		40,000,000	33,000,000	PENDAPATAr ASLI DAERAI (PAD)	J 1
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								104,500,000	30,500,000		
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Kab. Sampang, Torjun, Semua Kelurahan		10 Unit		7,500,000	5,500,000	PENDAPATAr ASLI DAERAI (PAD)	J 1
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara		Kab. Sampang, Torjun, Semua Kelurahan		40 Unit		7,000,000	5,000,000	PENDAPATAr ASLI DAERAI (PAD)	J 1

7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Sampang, Torjun, Semua Kelurahan	10 Unit	15,000,000	10,000,000	PENDAPATAr ASLI DAERAI (PAD)	J 1
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Sampang, Torjun, Semua Kelurahan	3 Unit	75,000,000	10,000,000	PENDAPATAr ASLI DAERAI (PAD)	J 1
7	01	01	2.13		Penataan Organisasi				45,000,000	500,000		
7	01	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Sampang, Torjun, Semua Kelurahan	1 Laporan	45,000,000	500,000	DOK. SKM	J 1
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				5,000,000	5,000,000		
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				5,000,000	5,000,000		
7	01	02	2.02	03	Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				5,000,000	5,000,000	PENDAPATAr ASLI DAERAI (PAD)	J 1
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				75,000,000	54,500,000		
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				75,000,000	54,500,000		
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kab. Sampang, Torjun, Semua Kelurahan	1 Dokumen	75,000,000	16,000,000	PENDAPATAr ASLI DAERAI (PAD)	J 1
				03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					38,500,000	PKK BLM DI ENTRY	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				45,000,000	5,000,000		
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				45,000,000	5,000,000		
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				45,000,000	5,000,000	PENDAPATAr ASLI DAERAI (PAD)	J 1
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				52,000,000	15,000,000		
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				52,000,000	15,000,000		
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Sampang, Torjun, Semua Kelurahan	12 Dokumer	25,000,000	7,000,000	PENDAPATAI ASLI DAERAI (PAD)	J 1
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Sampang, Torjun, Semua Kelurahan	12 Dokumen	12,000,000	8,000,000	PENDAPATAr ASLI DAERAI (PAD)	J 1
7	01	06	2.01	06	Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kab. Sampang, Torjun, Semua Kelurahan	12 Dokumen	15,000,000	-	DELETE	J 1
TOTAL									3,872,919,588			

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
Tolok Ukur	Target	
		4,534,500,000
		4,252,000,000
		38,500,000
		6,000,000
		6,000,000
		6,000,000
		6,000,000
		6,000,000
		8,500,000
		3,534,000,000
		3,500,000,000
		15,000,000
		6,000,000
		7,000,000
		6,000,000
		10,000,000

		10,000,000
		157,000,000
		17,500,000
		23,500,000
		20,000,000
		10,000,000
		4,000,000
		6,500,000
		75,500,000
		215,000,000
		75,000,000
		40,000,000
		100,000,000
		120,000,000
		20,000,000
		55,000,000
		45,000,000
		127,500,000
		7,500,000
		10,000,000

		20,000,000
		90,000,000
		50,000,000
		50,000,000
		7,500,000
		7,500,000
		7,500,000
		80,000,000
		80,000,000
		80,000,000
		50,000,000
		50,000,000
		50,000,000
		145,000,000
		145,000,000
		30,000,000
		15,000,000
		100,000,000
		4,534,500,000

BAB V PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang disusun sejalan dengan Tema RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2024 yaitu **“Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung pemantapan pemulihan ekonomi melalui penguatan sector unggulan dan infrastruktur yang berkelanjutan menuju Sampang Hebat Bermartabat”** dan penjabaran dari tujuan Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang yang tertuang dalam Renstra yaitu **“Meningkatnya tata kelola pemerintahan di Kecamatan**

Hasil evaluasi atas Renja Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang tahun 2022 menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja program/kegiatan adalah 98 % atau dapat dikategorikan sangat baik.

Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Torjun Tahun 2024 haruslah konsisten dan selaras dengan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Torjun yang telah dituangkan dalam Renstra Kecamatan Torjun Tahun 2019-2024. Adapun salah satu tujuan Kecamatan Torjun adalah **“Meningkatnya tata kelola Pemerintahan di Kecamatan”** yang didukung oleh 2 sasaran yaitu: 1. **Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan** 2. **Meningkatnya tata kelola administrasi pemerintahan Desa/Kelurahan**

Pada tahun 2024 Kecamatan Torjun akan melaksanakan Urusan Unsur Penunjang lainnya dengan total anggaran Rp 2.851.913.723,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.529.586.984,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp 322.326.739,00 Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung dan melaksanakan 1 urusan, 5 program dan 12 kegiatan. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan yaitu di Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang.

5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan dan Rencana Tindak Lanjut

Dalam rangka pelaksanaan renja tahun 2024 maka diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaan dan tindak lanjut supaya program dan kegiatan yang telah di rencanakan sesuai dengan harapan pembangunan. Adapun beberapa kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut adalah sebagai berikut:

1. Renja Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang haruslah berpedoman kepada RKPD dan disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional dan propinsi supaya perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan selaras dan bersinergi;

2. Dokumen Renja ini kemudian menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024;
3. Dokumen Renja ini digunakan sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat tahunan.

CAMAT TORJUN



SAFEAK, SE, MM
NIP. 19780714 200501 1 012